

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG
(STUDI DI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN
POLITIK PADA KADER PARTAI POLITIK)**

(Skripsi)

Oleh

**Nararya Amara Anggraini
2256021015**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG (STUDI DI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK PADA KADER PARTAI POLITIK)

Oleh

Nararya Amara Anggraini

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator untuk menilai kualitas demokrasi di daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam peningkatan IDI, salah satunya melalui pendidikan politik bagi kader partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam meningkatkan IDI melalui pendidikan politik kepada kader partai politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Kesbangpol Provinsi Lampung dan kader partai politik. Fokus penelitian adalah peran Kesbangpol sebagai mediator politik dan *guardian of political morality* dalam menjaga etika dan nilai demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol Provinsi Lampung berperan dalam peningkatan IDI melalui program pendidikan politik dan sosialisasi demokrasi, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan partisipasi kader. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kesbangpol cukup signifikan dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Lampung.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Indeks Demokrasi Indonesia, Kesbangpol, Pendidikan Politik.

ABSTRACT

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN IMPROVING IN INDONESIAN DEMOCRACY (IDI) IN LAMPUNG PROVINCE (A STUDY AT THE NATIONAL UNITY AND POLITICS AGENCY OF LAMPUNG PROVINCE IN ENHANCING POLITICAL EDUCATION FOR POLITICAL PARTY CADERS)

By

Nararya Amara Anggraini

The Indonesian Democracy Index (IDI) is an important indicator for assessing the quality of democracy at the regional level. Local governments play a strategic role in improving the IDI, particularly through political education for political party cadres. This study aims to analyze the role of the Provincial Government of Lampung, through the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol), in improving the IDI through political education for political party cadres. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving officials from Kesbangpol Province of Lampung and political party cadres. The study focuses on the role of Kesbangpol as a political mediator and as a guardian of political ethics in maintaining democratic values. The results show that Kesbangpol contributes to improving the IDI through political education programs and democracy socialization. However, challenges remain, including limited budgets and suboptimal participation of political party cadres. This study concludes that Kesbangpol plays a significant role in improving democratic quality in Lampung Province.

Keywords: *Local Government, Indonesian Democracy Index, Kesbangpol, Political Education*

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG
(STUDI DI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN
POLITIK PADA KADER PARTAI POLITIK)**

Oleh

Nararya Amara Anggraini

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENINGKATAN INDEKS DEMOKRASI
INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG
(STUDI DI KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG
DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN
POLITIK PADA KADER PARTAI POLITIK)**

Nama Mahasiswa : *Nararya Amara Anggraini*

Nomor Pokok Mahasiswa : **2256021015**

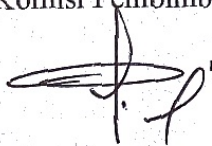
Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

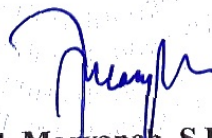
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Drs. Ismono Hadi, M.Si.
NIP. 196211271989021002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

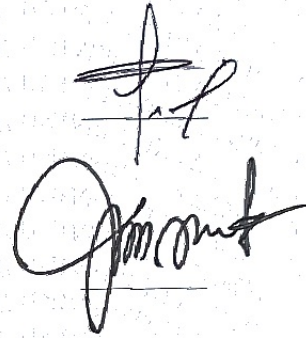


Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.
NIP. 1971006042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Ismono Hadi, M.Si.**



Penguji Utama : **Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **08 April 2026**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 08 April 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Nararya Amara Anggraini
NPM 2256021015

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nararya Amara Anggraini. Penulis dilahirkan di Jakarta, 04 Maret 2004. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Amar Pratama Effendi dan Ibu Novica Dwi Anggraini. Penulis mengawali pendidikan di SD S AL- Kautsar Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2016, SMP S AL-Kautsar diselesaikan pada tahun 2019 dan SMA S AL-Kautsar yang diselesaikan pada tahun 2022.

Selanjutnya pada tahun 2022, penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Pemerintahan. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Penulis pernah bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan akademik dan organisasi di tingkat jurusan. Selain itu, penulis juga ikut dalam kegiatan organisasi di tingkat fakultas dengan mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2024. Penulis juga pernah mengikuti kegiatan Magang MBKM Selama 6 Bulan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung pada bulan Maret – Agustus 2025. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2025 di Desa Purwodadi, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah : 5)

“Everything you lose is a step you take”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir.

dan

Ku persembahkan tulisan sederhana ini teruntuk sosok yang sangat luar biasa Ayahku dan Ibuku Terhebat, Tersayang, Terkasih dan Tercinta

Amar Pratama Effendi & Novica Dwi Anggraini

Beribu kata terima kasih tak dapat membalas semua kasih dan juga kebaikan yang kalian berikan demi seonggok jiwa yang masih perlu banyak diarahkan ini untuk menjadi insan yang lebih berguna.

Terima kasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Syukur Peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG (STUDI DI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG)”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan yang kita nantikan sya'faatnya diyaumul akhir nanti aamiin ya rabbal alamin.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan yang begitu mendalam bagi peneliti untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga melalui sanwacana ini. Setiap langkah dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta doa tulus dari banyak pihak yang telah dengan sabar dan penuh kasih memberikan kontribusinya. Tanpa mereka, segala pencapaian ini tidak akan mungkin tercapai. Dengan hati yang penuh rasa syukur, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
4. Bapak Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P., selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dan motivasi yang Bapak berikan sangat berarti. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan bimbingan yang telah diberikan, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia maupun akhirat.
5. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si., selaku dosen pembimbing utama. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ismono karena bapak sangat membantu penulis dari penyusunan judul hingga penyelesaian skripsi. Terimakasih juga atas saran dan ilmu yang telah bapak berikan selama saya menjadi mahasiswa, dan saya berdoa agar bapak selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat
6. Bapak Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P., selaku dosen penguji. Dengan penuh rasa hormat saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Darma yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menguji serta memberikan masukan berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kritik, saran, dan perhatian yang membangun selama ujian berlangsung. Semua masukan yang Bapak berikan menjadi pelajaran penting yang membantu saya berkembang. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan kesempatan yang diberikan, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas mulia ini.
7. Seluruh jajaran dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih bapak dan ibu dosen semuanya atas ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Kepada seluruh staf jurusan terimakasih karena telah memberikan bimbingan dan arahan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pemberkasan.

8. Kepada yang Tersayang Ayah Amar Pratama Effendi dan Ibu Novica Dwi Anggraini terimakasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayangnya memberikan semangat dalam bentuk materi dan motivasi. Gelar yang saya dapat sepenuhnya saya persembahkan untuk ayah dan ibu. Terimakasih sudah berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak untuk penulis hingga akhirnya saya bisa sampai dititik ini. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya yang akan saya dapatkan adalah karena beliau. Terimakasih untuk keberanian ayah yang menjadi motivasi saya untuk terus berani dan tangguh menghadapi apapun yang terjadi dan terimakasih untuk kesabaran ibu yang memotivasi saya terus sabar dan rendah hati dalam menghadapi kehidupan. Tolong hidup lebih lama di dunia ini, izinkan saya mengabdikan dan membalas segala pengorbanan ayah dan ibu selama ini.
9. Kepada yang Tersayang adik-adikku Mikhael, Habibah dan Sayeda Terima kasih atas doa, dukungan dan semangat. Walaupun sering dengan cara sederhana candaan dan perhatian kecil. Semoga yang aku capai hari ini juga bias menjadi semangat untuk kalian dalam meraih cita-cita dan impian. Semoga kita selalu saling menguatkan dalam setiap proses kehidupan, dan semoga kalian juga bisa meraih keberhasilan yang bahkan lebih besar dari apa yang aku capai hari ini. Terima kasih sudah menjadi adik yang selalu mendukung dan membanggakan.
10. Kepada yang Tersayang keponakanku Arabella Nakeisha Chaanakya Fatah Walaupun kamu masih kecil dan mungkin belum mengerti apa arti dari pencapaian ini, kehadiran dan tawamu selalu menjadi penyemangat di setiap langkahku. Senyum polosmu sering kali menjadi penghibur di saat lelah dan penat. Semoga kelak ketika kamu tumbuh besar, kamu menjadi anak yang sehat, cerdas, dan penuh kebaikan. Semoga setiap langkah kecilmu hari ini menjadi awal dari perjalanan indah menuju masa depan yang gemilang. Terima kasih sudah menjadi sumber kebahagiaan kecil yang berarti besar.
11. Teruntuk Sahabatku Intan Dafa Putri Terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin sejak bangku SD hingga saat ini. Dukungan, perhatian, dan semangat yang kamu berikan selama proses penyusunan karya ini sangat berarti bagi saya. Semoga persahabatan yang telah terbangun dapat terus

terjaga dengan baik, dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan serta keberhasilan dalam setiap langkah ke depan.

12. Teruntuk sahabatku dari masa putih biru Rifka, Yolanda, Fathiya, Daya, Sabrina dan Dian. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan hingga saat ini. Persahabatan yang terjalin sejak bangku SMP telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya, termasuk dalam proses penyusunan karya ini. Semoga kebersamaan dan silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik, serta semoga kita semua senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam setiap langkah ke depan.
13. Teruntuk sahabatku dari masa putih abu Eci, Enca, Tama, Paris dan Anas. Meskipun saat ini kita sudah jarang berkumpul seperti dulu, saya tetap bersyukur atas persahabatan yang pernah dan masih terjalin hingga sekarang. Terima kasih atas doa dan dukungan yang tetap diberikan, meskipun tidak selalu bertemu secara langsung. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap langkah, serta suatu waktu dapat kembali berbagi cerita dalam suasana yang lebih baik.
14. Teruntuk sahabatku di perkuliahan Garnis, Karina dan Sena. Terima kasih sudah jadi bagian dari perjalanan selama masa perkuliahan sampai akhirnya bisa sampai di tahap ini. Banyak hal yang kita lewati bersama tugas, diskusi, deadline, sampai momen-momen sederhana yang ternyata justru paling berkesan. Kehadiran kalian bukan cuma sebagai teman belajar, tapi juga teman berbagi cerita dan saling menguatkan di masa-masa yang nggak selalu mudah. Semoga setelah ini kita tetap saling mendukung di jalan masing-masing, dan semoga semua usaha yang sudah kita perjuangkan selama ini berbuah hasil yang baik. Terima kasih sudah kebersamaan proses ini.
15. Kepada Regina, Rita, Salsa, Intan, Dilla, Seli, Putri dan Mully orang yang tidak pernah penulis sangka akan menjadi teman seperjuangan sedekat ini. Berbeda kelas bukan halangan untuk saling mengerti betapa tidak mudahnya perjalanan skripsi ini dan di tengah semua itu kalian hadir, menemani dengan cara yang sederhana namun sangat berarti. Terima kasih sudah mau berjuang bersama. Semoga kita sama-sama sampai di garis akhir ini dan merayakannya bersama dengan kebanggaan yang sama besarnya.

16. Teruntuk teman-teman seperjuanganku pada magang Kesbangpol Provinsi Lampung Bella,Della,Fadia dan Fatur. Terima kasih atas kebersamaan selama enam bulan menjalani masa magang. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan selama berada di lingkungan kerja tersebut, yang juga turut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang diberikan, termasuk hal-hal kecil seperti saling membantu dan berbagi informasi, yang tanpa disadari sangat berarti dalam proses ini. Semoga pengalaman yang telah kita lalui bersama menjadi kenangan baik dan bekal yang bermanfaat untuk langkah kita ke depan.
17. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KKN Purwodadi Aal,Farrel,Nashwa,Melly,Wilda,Fani yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran dan perjalanan selama masa pengabdian. Kebersamaan, kerja sama, serta pengalaman yang telah dilalui bersama memberikan banyak pelajaran berharga, tidak hanya dalam konteks akademik tetapi juga dalam kehidupan sosial. Dukungan, semangat, dan kebersamaan yang terjalin selama KKN turut memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para kader partai politik yang telah terbuka dalam berbagi pengalaman dan pandangannya, sehingga sangat membantu penulis dalam memahami secara mendalam peran yang dikaji dalam penelitian ini. Tanpa kontribusi dan kerja sama yang baik dari para informan, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar.
19. Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dan bertahan hingga sampai pada titik ini. Proses yang dilalui tidak selalu mudah, namun setiap tantangan, hambatan, dan kelelahan yang dihadapi menjadi bagian dari pembelajaran yang berharga. Kesabaran, ketekunan, dan komitmen untuk terus melangkah hingga penyusunan skripsi ini selesai merupakan pencapaian yang patut disyukuri. Semoga apa yang telah dilalui dapat menjadi bekal untuk menghadapi langkah selanjutnya.

20. Teruntuk pemilik NPM 2252011025. Terima kasih telah hadir dan kebersamai penulis sejak 7 tahun kebelakang sampai dengan sekarang, Tidak sedikit fase yang kita lewati, dari masa yang masih labil sampai pada tahap yang menuntut kita untuk lebih dewasa dalam bersikap dan mengambil keputusan. Terima kasih telah menjadi tempat keluh kesah, dengan kesabaran yang tidak pernah berkurang. Terima kasih atas dukungan emosional dan motivasi yang terus kamu berikan di setiap proses yang penulis jalani. Semoga kebersamaan ini tidak berhenti di sanwacana saja. Semoga apa yang sudah kita bangun sejak dulu bisa terus dijaga dengan komitmen, saling menghargai, dan tetap memilih untuk bersama dalam setiap proses ke depan.

Bandar Lampung, 08 April 2026

Penulis

Nararya Amara Anggraini

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Peran Pemerintah Daerah	11
2.1.1 Pengertian Peran Pemerintah Daerah	11
2.1.2 Bentuk Peran Pemerintah Daerah.....	12
2.1.3 Jenis Peran Pemerintah Daerah	13
2.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	14
2.2.1 Sejarah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	14
2.2.2 Definisi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	19
2.2.3 Indikator-Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).....	20
2.3 Teori Peran Negara dalam Pendidikan Politik	22
2.4 Tinjauan Pendidikan Politik.....	24
2.4.1 Pengertian Pendidikan Politik	24
2.4.2 Bentuk Pendidikan Politik.....	25
2.4.3 Jenis-Jenis Pendidikan Politik	26
2.5 Tinjauan Partai Politik dan Kader Politik.....	28
2.5.1 Konsep Partai Politik.....	28
2.5.2 Pengertian Partai Politik	29
2.5.3 Bentuk-Bentuk Partai politik	31
2.5.4 Jenis-Jenis Partai Politik.....	32
2.6 Tinjauan Kader Partai Politik	35
2.6.1 Definisi Kader	35
2.6.2 Bentuk-Bentuk Kader	37
2.7 Kerangka Pikir.....	41

III. METODOLOGI PENELITIAN.....	44
3.1 Tipe Penelitian.....	44
3.2 Fokus Penelitian	44
3.3 Lokasi Penelitian	45
3.4 Sumber Data	45
3.5 Jenis Data	46
3.6 Informan Penelitian	46
3.7 Teknik Pengolahan Data	47
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	48
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung	49
4.2 Tinjauan Umum Tugas dan Fungsi Kesbangpol Provinsi Lampung	50
4.2.1 Tinjauan Umum Kesbangpol Provinsi Lampung	50
4.2.2 Tugas dan Fungsi Kesbangpol Provinsi Lampung.....	51
4.3 Struktur Organisasi Kesbangpol Provinsi Lampung.....	55
4.3.1 Struktur Organisasi.....	56
4.3.2 Sekretariat.....	57
4.3.3 Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	58
4.3.4 Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional	59
4.3.5 Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.....	59
4.4 Hasil Penelitian.....	63
4.4.1 <i>Civic Educator</i>	66
4.4.2 Mediator Politik.....	75
4.4.3 <i>Guardian of Political Morality</i>	82
4.5 Pembahasan	89
4.5.1 <i>Civic Educator</i>	89
4.5.2 Mediator Politik.....	91
4.5.3 <i>Guardian of Political Morality</i>	93
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	97
5.1 Simpulan.....	97
5.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Indeks Demokrasi Provinsi Lampung.....	3
2. Skala Nilai IDI	18
3. Informan Penelitian.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tabel Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	5
2. Kerangka Pikir	43
3. Struktur Organisasi Kesbangpol Provinsi Lampung.....	55
4. Kegiatan <i>Focus Grup Discussion (FGD)</i>	68
5. Kegiatan Pendidikan Politik Partai Golkar	69
6. Kegiatan dilaksanakan di kediaman Ketua DPW PAN Lampung, Teluk Betung Selatan	72
7. Kegiatan Pembinaan Partai Politik.....	73
8. Kegiatan Pendidikan Politik Partai Golkar	77
9. Kegiatan Pendidikan Politik dan Kaderisasi	80
10. Rapat bimbingan teknis tata cara pengajuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik tingkat Provinsi Lampung	84
11. Rapat Penyusunan Rekomendasi Akuntabilitas dan Efektivitas Bantuan Keuangan Partai Politik.....	85
12. Kegiatan Pembinaan Partai Politik Tingkat	89
13. Acara Pembinaan Partai Politik Tingkat	91
14. Acara Pembinaan Partai Politik Tingkat	93
15. Rapat Penyusunan Rekomendasi Akuntabilitas dan Efektivitas Bantuan Keuangan Partai Politik.....	94

DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
Kab/Kota	: Kabupaten/Kota
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
ID	: <i>Indonesian Democracy</i> (dalam konteks istilah IDI)
IDI	: Indeks Demokrasi Indonesia
Ormas	: Organisasi Kemasyarakatan
PAN	: Partai Amanat Nasional
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Prov.	: Provinsi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas demokrasi di Provinsi Lampung tercermin dalam capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang menunjukkan tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai IDI Lampung masih berada pada kategori sedang dan belum menunjukkan peningkatan yang konsisten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik demokrasi di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi partisipasi politik, kebebasan sipil, maupun kinerja lembaga demokrasi (Badan Pusat Statistik, 2022).

Jika ditinjau lebih lanjut, salah satu aspek yang relatif lemah terdapat pada indikator lembaga demokrasi, khususnya yang berkaitan dengan fungsi partai politik dalam menjalankan kaderisasi dan pendidikan politik. Lemahnya kapasitas kelembagaan partai politik berdampak pada rendahnya kualitas partisipasi politik, yang cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi yang sadar, rasional, dan berbasis pemahaman demokrasi (Badan Pusat Statistik, 2022). Dalam konteks ini, partai politik belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai pilar utama demokrasi dalam membentuk kader yang memiliki kapasitas politik dan integritas yang memadai (Budiardjo, 2015; Surbakti, 2010).

Dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah menjalankan perannya melalui berbagai program pendidikan politik bagi kader partai politik. Kesbangpol berperan sebagai civic educator, mediator politik, dan guardian of political morality dengan memberikan pemahaman terkait nilai-nilai demokrasi, partisipasi

politik, serta penguatan kapasitas kader. Pelaksanaan program ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui jalur pendidikan politik (Budiardjo, 2015).

Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan, efektivitas pendidikan politik tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh keberlanjutan implementasi di tingkat partai politik. Terdapat fenomena bahwa beberapa partai politik tidak melanjutkan komunikasi dan koordinasi secara aktif setelah mengikuti kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Kesbangpol. Partisipasi partai politik cenderung terbatas pada saat kegiatan berlangsung, sementara tindak lanjut dalam bentuk kaderisasi internal maupun penguatan organisasi belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kendala tidak terletak pada pelaksanaan program oleh Kesbangpol, melainkan pada belum maksimalnya respons dan komitmen sebagian partai politik dalam menginternalisasikan hasil pendidikan politik tersebut (Aspinall & Mietzner, 2019; Warburton & Power, 2017).

Lebih lanjut, kondisi ini juga mencerminkan bahwa sebagian partai politik masih berorientasi pada kepentingan jangka pendek, terutama yang berkaitan dengan agenda elektoral, sehingga aspek pendidikan politik belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan organisasi. Akibatnya, fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi kader dan masyarakat belum berjalan secara optimal. Hal ini berdampak pada kualitas partisipasi politik yang masih cenderung prosedural dan belum sepenuhnya berkembang ke arah partisipasi yang substantif (Muhtadi, 2019; Fossati et al., 2020).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun Kesbangpol telah melaksanakan pendidikan politik sebagai bagian dari peran strategisnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada komitmen dan tindak lanjut dari partai politik sebagai peserta. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan sinergi antara Kesbangpol dan partai politik, khususnya dalam mendorong keberlanjutan komunikasi, implementasi hasil pendidikan politik,

serta peningkatan kesadaran partai politik terhadap pentingnya kaderisasi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu permasalahan mendasar yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya perkembangan demokrasi di Provinsi Lampung meskipun telah terdapat berbagai upaya penguatan. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pendidikan politik dan keterlibatan kader partai politik dalam demokrasi di Provinsi Lampung, diperlukan analisis berbasis data. Oleh karena itu, disajikan tabel yang memuat indikator-indikator terkait dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2018 hingga 2024 sebagai dasar dalam menganalisis peran Badan Kesbangpol dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan politik di daerah.

Tabel 1. Indeks Demokrasi Provinsi Lampung

No.	Tahun	Skor IDI	Kategori	Catatan
1.	2018	68,67	Sedang	Demokrasi masih “sedang”, kelembagaan dan partisipasi politik belum optimal.
2.	2019	72,56	Sedang	Terjadi peningkatan, namun kapasitas lembaga demokrasi masih perlu penguatan.
3.	2022	78,32	Sedang	Skor meningkat, kebebasan dan kesetaraan membaik, lembaga demokrasi masih lemah.
4.	2023	78,32	Sedang	Nilai stagnan, penguatan kelembagaan dan pendidikan politik belum efektif.
5.	2024	72,62	Sedang	Terjadi

penurunan,menunjukkan
tantangan konsistensi
penguatan demokrasi.

Sumber: lampung.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Lampung selama periode 2018 hingga 2024 cenderung berada pada kategori “sedang” (skor 60–80), meskipun terdapat fluktuasi skor dari tahun ke tahun. Peningkatan yang terjadi pada 2019 dan 2022 menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam aspek kebebasan dan kesetaraan, namun aspek kapasitas lembaga demokrasi, termasuk partai politik, mekanisme kontrol publik, dan partisipasi politik masyarakat, masih relatif rendah. (Badan Pusat Statistik, 2024) Aspek lembaga demokrasi masih lemah karena penguatan kelembagaan belum berjalan secara sistemik dan berkelanjutan. Meskipun terdapat program pendidikan politik, efektivitasnya belum mampu meningkatkan kapasitas partai politik dan lembaga demokrasi secara signifikan.

Kondisi stagnan pada 2023 dan penurunan pada 2024 mengindikasikan bahwa transformasi demokrasi di Lampung belum konsisten dan belum mencapai level “baik” (skor >80)(Badan Pusat Statistik, 2024). Hal ini menjadi indikasi bahwa pendidikan politik, penguatan kelembagaan, dan peran partai politik perlu lebih intensif untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis dalam skripsi ini, aspek lembaga demokrasi masih tergolong lemah karena kapasitas lembaga demokrasi dinyatakan belum optimal dan masih memerlukan penguatan melalui pendidikan politik serta peningkatan kapasitas partai politik . Selain itu, masih diperlukan penguatan peran partai politik dan lembaga demokrasi lainnya dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi .Penurunan skor IDI Provinsi Lampung pada tahun 2024 menjadi 72,62 semakin menegaskan bahwa penguatan kelembagaan belum berjalan secara konsisten dan memerlukan perhatian lebih lanjut (Badan Pusat Statistik, 2024).

Indikator IDI	Indikator Indeks Demokrasi Indonesia IDI Provinsi Lampung			
	2021	2022	2023	2024
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	93.85	60.62	85.07	79.38
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	53.86	92.43	55.2	85.27
Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	84.62	100	80.09	100
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap k	75	81.25	75	81.25
Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	94.41	94.41	94.41	72.49
Pemenuhan hak-hak pekerja	46.8	45.68	49.27	38.5
Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	77.52	79.2	69.76	62.04
Kesetaraan Gender	89.62	89.99	89.88	89.29
Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100	100	100	30.59
Anti monopoli sumber daya ekonomi	69.67	66.5	65.5	66.33
Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	79.86	69.21	73.21	77.12
Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	95.31	95.48	95.77	95.81
Akses masyarakat terhadap informasi publik	69.12	70.4	73.67	63.4
Kesetaraan dalam pelayanan dasar	76.34	76.77	77.13	77.67
Kinerja Lembaga Legislatif	58.33	40	73.68	74.07
Kinerja Lembaga Yudikatif	89.65	86.17	88.93	89.37
Netralitas Penyelenggara Pemilu	87.5	87.5	87.5	46.88
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait kebijakan pejabat pemerintah	71.88	50	59.38	78.12
Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	68.56	69.1	69.91	73.11
Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100	71.43	100	85.71
Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	75.2	86.2	81	85.4
Pendidikan Politik pada kader partai politik	100	100	71.11	20
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	80.18	78.32	78.37	72.62

Gambar 1. Tabel Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

Berdasarkan tabel perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Lampung periode 2019–2024, terlihat bahwa kualitas demokrasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 hingga 2022, nilai IDI menunjukkan kecenderungan peningkatan yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam aspek-aspek demokrasi. Namun, pada tahun 2023 terjadi stagnasi, dan pada tahun 2024 tercatat penurunan skor menjadi 72,62. (Badan Pusat Statistik, 2024)

Penurunan tersebut menjadi perhatian penting karena mencerminkan belum stabilnya konsolidasi demokrasi di tingkat daerah. Meskipun berbagai program penguatan demokrasi telah dilaksanakan, khususnya melalui pendidikan politik dan pembinaan kelembagaan, hasil yang dicapai belum menunjukkan penguatan yang konsisten dan berkelanjutan. Fluktuasi nilai ini menandakan bahwa beberapa indikator demokrasi, terutama pada aspek lembaga demokrasi, masih menghadapi tantangan struktural dan fungsional. (Badan Pusat Statistik, 2024)

Secara umum, tabel tersebut menggambarkan bahwa demokrasi di Provinsi Lampung masih berada dalam kategori sedang dan belum mencapai tingkat

yang mapan. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi penurunan nilai IDI, khususnya terkait peran lembaga demokrasi dan upaya penguatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Bagian tabel yang diberi penanda warna kuning menunjukkan indikator yang memerlukan perhatian khusus dalam analisis penelitian. Penandaan tersebut mengindikasikan adanya penurunan atau kelemahan relatif pada aspek tertentu, khususnya pada aspek lembaga demokrasi, sehingga menjadi fokus utama dalam pembahasan mengenai kualitas demokrasi di Provinsi Lampung.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tren kenaikan di beberapa tahun, proses penguatan demokrasi di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal kapasitas lembaga dan konsistensi partisipasi politik publik. Oleh karena itu, strategi penguatan demokrasi yang lebih terfokus dan berkelanjutan, termasuk peran Badan Kesbangpol dalam pendidikan politik kader partai politik, menjadi kunci untuk meningkatkan skor IDI di masa mendatang.

Dalam penyusunan penelitian ini, penting untuk meninjau berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema peningkatan indeks demokrasi, pendidikan politik, serta peran lembaga pemerintah daerah dalam penguatan sistem demokrasi. Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya bertujuan untuk memahami sejauh mana isu yang diangkat telah diteliti oleh peneliti lain, menemukan kesenjangan penelitian (research gap), serta menjadi landasan konseptual bagi penelitian ini. Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dan kualitas demokrasi di daerah, sementara lembaga seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran strategis dalam mendorong terbentuknya kader partai yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan. Namun demikian, penelitian yang secara spesifik mengkaji strategi Kesbangpol Provinsi Lampung dalam meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui pendidikan politik kader partai politik

masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penjabaran penelitian terdahulu berikut ini akan menjadi pijakan penting untuk menegaskan posisi penelitian ini dalam konteks akademik dan praktis.

Penelitian pertama berjudul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda” oleh I Made Adnyanaesa dan I Ketut Utama. Penelitian ini menganalisis peran Bakesbangpol dalam mendorong partisipasi politik generasi muda melalui program pendidikan politik di tingkat daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan politik mampu meningkatkan pemahaman politik generasi muda, namun efektivitasnya masih terbatas oleh rendahnya kesadaran politik dan kurangnya inovasi metode pembelajaran. Secara substansi, penelitian ini menempatkan pendidikan politik sebagai instrumen peningkatan partisipasi masyarakat umum, tanpa mengkaji secara spesifik sasaran kader partai politik maupun keterkaitannya dengan kualitas demokrasi yang terukur.

Penelitian kedua berjudul “Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam Mendorong Pendidikan Politik bagi Organisasi Masyarakat” oleh Ikhmatu Solikah. Penelitian ini berfokus pada strategi kelembagaan Bakesbangpol dalam mengembangkan pendidikan politik melalui pendekatan kolaboratif dengan organisasi masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi tersebut cukup relevan dalam meningkatkan literasi politik, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Meskipun mengkaji aktor negara yang sama, penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan programatik dan sasaran organisasi masyarakat sipil, bukan pada kader partai politik maupun implikasinya terhadap kualitas demokrasi daerah.

Penelitian ketiga berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Kader Partai oleh DPD Partai Golkar Sumatera Barat” oleh Ahmad Lubis dan rekan-rekan. Penelitian ini mengkaji praktik pendidikan politik internal partai dalam membentuk kader yang memahami ideologi dan etika politik. Temuannya

menunjukkan bahwa pendidikan politik telah dilaksanakan secara periodik, namun cenderung bersifat formalitas dan belum menyentuh substansi nilai-nilai demokrasi secara mendalam. Penelitian ini relevan dalam hal fokus pada kader partai, tetapi berbeda secara mendasar karena menempatkan partai politik sebagai aktor utama, bukan pemerintah daerah, serta tidak mengaitkan pendidikan politik dengan indikator kualitas demokrasi yang lebih luas.

Penelitian keempat berjudul “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan melalui Pendidikan Politik” oleh Dwi Hariyanti dan rekan-rekan. Penelitian ini menyoroti pendidikan politik sebagai sarana pemberdayaan kader perempuan dalam meningkatkan partisipasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik internal partai berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan diri dan keterlibatan perempuan dalam ruang publik. Namun, fokus penelitian ini terbatas pada aspek gender dan pemberdayaan, sehingga tidak membahas peran aktor negara maupun kaitannya dengan kualitas demokrasi secara makro.

Penelitian kelima oleh Monica Ayomi berjudul “Implementasi Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Pendidikan Politik oleh DPC PDIP Kota Depok Tahun 2021–2023”. Penelitian ini mengkaji pemanfaatan bantuan keuangan partai politik dalam mendukung kegiatan pendidikan politik. Temuan menunjukkan bahwa alokasi dana belum optimal dan cenderung digunakan untuk kepentingan administratif partai. Meskipun berkaitan dengan pendidikan politik, penelitian ini berfokus pada aspek tata kelola keuangan partai, bukan pada peran pemerintah daerah sebagai pelaksana pendidikan politik maupun dampaknya terhadap kualitas demokrasi.

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai pendidikan politik telah banyak dilakukan, baik oleh aktor negara maupun partai politik, dengan berbagai fokus seperti partisipasi masyarakat, strategi kelembagaan, kaderisasi partai, pemberdayaan gender, hingga pengelolaan keuangan politik. Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya belum

secara komprehensif menghubungkan peran pendidikan politik yang dilakukan oleh aktor negara, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan indikator kualitas demokrasi yang terukur seperti Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara spesifik peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi kader partai politik serta keterkaitannya dengan peningkatan kualitas demokrasi daerah yang tercermin dalam IDI.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengidentifikasi Penyebab menurunnya Indeks Demokrasi di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana peran Kesbangpol Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi kader partai politik?
3. Bagaimana Strategi Kesbangpol Provinsi Lampung dalam meningkatkan Indeks Demokrasi di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis strategi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader partai politik.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan politik bagi kader partai politik yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Provinsi Lampung.
3. Menilai kontribusi pendidikan politik bagi kader partai politik terhadap peningkatan Indeks Demokrasi di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam bidang demokrasi lokal, sistem kepartaian, dan pendidikan politik.
- b. Memperkaya literatur ilmiah mengenai peran lembaga pemerintah daerah, terutama Badan Kesbangpol, dalam membina partai politik dan meningkatkan kualitas kader politik.
- c. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas strategi peningkatan indeks demokrasi melalui pendidikan politik di tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Menjadi bahan masukan bagi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam merumuskan strategi pendidikan politik yang efektif dan berkelanjutan bagi kader partai politik.
- b. Memberikan rekomendasi kepada partai politik di Provinsi Lampung agar dapat menyusun program kaderisasi yang lebih terarah, sistematis, dan berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah, partai politik, dan masyarakat dalam upaya peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Peran Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah adalah serangkaian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Peran tersebut diwujudkan melalui kebijakan, program, serta tindakan nyata yang bertujuan untuk melayani masyarakat, menjaga ketertiban, dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Widjaja, 2007).

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam bidang politik dan demokrasi. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kansil, 2008; Syarifuddin, 2012). Pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan pengawas dalam kehidupan politik daerah (Damayanti, 2020).

Dalam konteks penelitian ini, peran pemerintah daerah merujuk pada peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik kepada kader partai politik, menjaga etika dan moral politik, serta

menciptakan iklim politik yang kondusif guna mendukung peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Peran pemerintah daerah dapat dipahami sebagai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya. Peran tersebut merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan yang diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan status lembaga pemerintahan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam memberikan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta menciptakan stabilitas politik di daerah (Faguet, 2014; Smoke, 2015).

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran sebagai pengarah, pengatur, dan pengendali dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di tingkat lokal. Peran ini mencakup fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam menciptakan iklim politik yang demokratis dan beretika. Dengan demikian, peran pemerintah daerah merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung peningkatan kualitas demokrasi di daerah (Grindle, 2017; Hadiz, 2017).

2.1.2 Bentuk Peran Pemerintah Daerah

Bentuk peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi diwujudkan melalui berbagai fungsi dan tindakan nyata. Pemerintah daerah berperan sebagai Civic Educator, yaitu menyediakan ruang, sarana, dan program pendidikan politik bagi kader partai politik guna meningkatkan pemahaman demokrasi dan partisipasi politik (Surbakti, 2010; Budiardjo, 2015). Selain itu, pemerintah daerah juga berperan sebagai mediator politik, yang menjembatani komunikasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk menyalurkan

aspirasi serta mencegah terjadinya konflik politik (Surbakti, 2010).

Di samping itu, pemerintah daerah memiliki peran sebagai pengawas dan Pembina (GuardianOf Political Morality) , khususnya dalam menjaga etika dan moral politik, dengan melakukan pembinaan terhadap partai politik agar praktik politik tetap sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi (Budiardjo, 2015; Asshiddiqie, 2010).

Melalui berbagai bentuk peran tersebut, pemerintah daerah berkontribusi secara langsung dalam menciptakan iklim politik yang kondusif dan mendukung peningkatan kualitas demokrasi yang tercermin dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di daerah (Badan Pusat Statistik, 2022).

2.1.3 Jenis Peran Pemerintah Daerah

Pertama, sebagai civic educator, pemerintah daerah berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan kader partai politik melalui berbagai program, sosialisasi, dan kegiatan edukatif guna meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi serta mendorong partisipasi politik yang aktif dan rasional (Surbakti, 2010; Budiardjo, 2015).

Kedua, sebagai mediator politik, pemerintah daerah berfungsi menjembatani komunikasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi serta meredam potensi konflik politik, sehingga tercipta stabilitas politik di daerah (Surbakti, 2010).

Ketiga, sebagai guardian of political morality, pemerintah daerah berperan dalam menjaga etika dan moral politik melalui fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap partai politik agar praktik politik tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi (Budiardjo, 2015; Asshiddiqie, 2010).

Melalui ketiga peran tersebut, pemerintah daerah berkontribusi dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

2.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

2.2.1 Sejarah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dikembangkan sebagai alat ukur untuk menilai kualitas dan perkembangan demokrasi di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. IDI lahir sebagai respons terhadap kebutuhan data yang objektif mengenai kondisi demokrasi pasca reformasi 1998, ketika Indonesia mengalami peralihan dari rezim otoriter menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka. Dengan adanya IDI, pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat dapat memahami secara kuantitatif sejauh mana demokrasi diterapkan di berbagai wilayah (Badan Pusat Statistik, 2022; *United Nations Development Programme*, 2014).

Sejak awal diperkenalkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, IDI menggunakan tiga aspek utama sebagai indikator penilaian demokrasi. Ketiga aspek tersebut adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Ketiga aspek tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah variabel yang menjadi dasar penghitungan indeks (Badan Pusat Statistik, 2022).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen pengukuran tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks ini digunakan untuk menilai kualitas demokrasi baik di tingkat nasional maupun provinsi berdasarkan sejumlah indikator yang terukur. Secara konseptual, IDI mengukur demokrasi melalui tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi (Badan Pusat Statistik, 2022; Dahl, 1989).

1. Aspek Kebebasan Sipil

Aspek kebebasan sipil diukur melalui indikator yang menggambarkan sejauh mana negara menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga

negara dari pembatasan, intimidasi, kekerasan, maupun diskriminasi (Badan Pusat Statistik, 2022).

a. Kebebasan berkumpul dan berserikat

Indikator pada variabel ini meliputi ada atau tidaknya pembatasan terhadap kegiatan organisasi dan perkumpulan, pembubaran kegiatan secara paksa, tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap kelompok masyarakat, serta hambatan administratif dalam pembentukan organisasi.

b. Kebebasan berpendapat

Indikatornya mencakup adanya pembatasan penyampaian pendapat di muka umum, ancaman atau kekerasan terhadap individu atau kelompok yang menyampaikan aspirasi, serta hambatan terhadap kebebasan pers dan media dalam menyampaikan informasi.

c. Kebebasan berkeyakinan atau beragama

Indikatornya meliputi adanya pembatasan aktivitas keagamaan, konflik atau kekerasan berlatar belakang agama, penolakan pendirian rumah ibadah, serta perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas agama.

d. Kebebasan dari diskriminasi

Indikatornya mencakup tindakan diskriminatif berdasarkan gender, agama, etnis, atau kelompok sosial tertentu, kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan, serta perlakuan tidak setara terhadap kelompok rentan dalam kehidupan sosial dan politik.

2. Aspek Hak-Hak Politik

Aspek hak-hak politik menilai sejauh mana warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik (Badan Pusat Statistik).

a. Hak memilih dan dipilih.

Indikator pada variabel ini meliputi hambatan dalam penggunaan hak pilih, pembatasan dalam pencalonan jabatan publik, serta praktik tekanan atau kecurangan dalam proses pemilu.

b. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan

pemerintahan.

Indikatornya meliputi keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan, akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan dan kontrol sosial, serta respons pemerintah terhadap aspirasi publik.

c. Partisipasi politik dalam pemilihan umum

Indikatornya mencakup tingkat partisipasi pemilih, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi politik, serta minimnya intimidasi atau tekanan dalam proses pemilu.

d. Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik

Indikatornya meliputi persentase perempuan dalam DPRD, keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik, serta keberadaan kebijakan afirmatif yang mendukung partisipasi politik perempuan.

3. Aspek Lembaga Demokrasi

Aspek lembaga demokrasi mengukur kinerja dan fungsi institusi demokrasi dalam menjalankan prinsip representasi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (Badan Pusat Statistik, 2022).

a. Peran DPRD

Indikatornya meliputi pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta akuntabilitas kinerja DPRD kepada masyarakat.

b. Peran partai politik

Indikatornya mencakup pelaksanaan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat, sistem kaderisasi dan rekrutmen politik, serta kepatuhan terhadap prinsip demokrasi internal partai.

c. Peran birokrasi pemerintah daerah

Indikatornya meliputi netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu, profesionalitas birokrasi, serta pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif.

d. Peran peradilan yang independen

Indikatornya mencakup independensi hakim dalam memutus perkara, tidak adanya intervensi politik dalam proses hukum, serta penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.

Secara hierarkis, pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terdiri atas tiga aspek utama, sebelas variabel, dan sejumlah indikator operasional yang memiliki skor serta bobot tertentu. Nilai akhir indeks dinyatakan dalam skala 0 sampai 100, di mana semakin tinggi skor menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin baik (Badan Pusat Statistik, 2022; Kurniawan, 2020).

Masing-masing aspek tersebut terdiri atas sejumlah indikator yang kemudian dijabarkan ke dalam variabel-variabel pengukuran. Nilai IDI diperoleh melalui tahapan agregasi secara berjenjang, yaitu dari skor variabel menjadi skor indikator, kemudian menjadi skor aspek, hingga akhirnya menghasilkan nilai indeks demokrasi secara keseluruhan. Metode penghitungan ini digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif kondisi demokrasi di suatu wilayah berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh melalui berbagai sumber informasi, seperti analisis dokumen, media massa, serta penilaian para ahli (Badan Pusat Statistik, 2022).

1. Perhitungan Skor Indikator

$$\text{Indikator} = \frac{\sum \text{Skor Variabel}}{\text{Jumlah Variabel}}$$

2. Perhitungan Skor Aspek

$$\text{Aspek} = \frac{\sum \text{Skor Variabel}}{\text{Jumlah Variabel}}$$

3. Perhitungan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

$$\text{IDI} = \text{Kebebasan Sipil} + \text{Hak Politik} + \text{Lembaga Demokrasi}$$

Nilai IDI berada pada rentang skala 0 hingga 100, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. Skala Nilai IDI

Skala Nilai	Kategori Tingkat Demokrasi
0-60	Buruk
60-80	Sedang
80-100	Baik

Semakin tinggi nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diperoleh, maka semakin baik pula tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah. Sebaliknya, penurunan nilai IDI menunjukkan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, baik dalam aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, maupun kinerja lembaga demokrasi. Dengan demikian, Indeks Demokrasi Indonesia dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dalam menilai kualitas demokrasi di tingkat daerah serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan demokrasi secara substantif (Badan Pusat Statistik, 2022).

Penilaian IDI diberikan dalam skala 0 hingga 100, dengan kategori “sangat rendah” (<40), “rendah” (40–60), “sedang” (60–80), dan “tinggi/baik” (>80). Sejak diperkenalkan, IDI telah rutin dihitung setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan hasilnya dipublikasikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi. Data IDI tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, strategi pendidikan politik, penguatan partai politik, dan perbaikan kelembagaan demokrasi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022).

Dengan demikian, IDI menjadi instrumen penting dalam memahami dan meningkatkan kualitas demokrasi, sekaligus membantu pemerintah dan

lembaga terkait merumuskan strategi yang tepat untuk mendorong partisipasi politik, memperkuat lembaga demokrasi, dan memastikan demokrasi di Indonesia berkembang secara berkelanjutan (United Nations Development Programme, 2014).

2.2.2 Definisi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai dan membandingkan tingkat demokrasi di berbagai negara atau wilayah. Dalam konteks Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas demokrasi di setiap provinsi. IDI mengukur berbagai aspek yang mencakup proses politik, partisipasi masyarakat, kebebasan sipil, dan fungsi pemerintahan (Badan Pusat Statistik, 2022; Bappenas & UNDP, 2010).

Secara umum, Indeks Demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem penilaian yang mengkategorikan kondisi demokrasi berdasarkan indikator-indikator tertentu. Indeks ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif mengenai kemajuan demokrasi di suatu daerah, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pembangunan demokrasi. Dengan menggunakan IDI, para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil, dapat memahami dinamika politik yang ada dan merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas demokrasi (Dahl, 1989; *International Idea*, 2021).

IDI terdiri dari beberapa dimensi utama, yaitu partisipasi politik, kebebasan sipil, proses pemilihan, dan fungsi pemerintahan. Masing-masing dimensi ini diukur melalui indikator-indikator yang relevan, yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, partisipasi politik diukur melalui tingkat kehadiran pemilih dalam pemilu, sementara kebebasan sipil dinilai berdasarkan perlindungan hak-hak individu dan

kebebasan berpendapat (Badan Pusat Statistik, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman yang mendalam tentang definisi dan komponen-komponen yang membentuk Indeks Demokrasi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana optimalisasi kaderisasi partai politik dapat berkontribusi pada peningkatan IDI di Provinsi Lampung. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali pengalaman dan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses kaderisasi, serta dampaknya terhadap partisipasi politik dan kualitas demokrasi di daerah tersebut. Dengan demikian, analisis terhadap Indeks Demokrasi akan menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi kaderisasi yang lebih efektif dan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas demokrasi daerah (Badan Pusat Statistik, 2022).

2.2.3 Indikator-Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terdiri dari sejumlah indikator yang dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas demokrasi di suatu daerah. Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan kondisi politik, sosial, dan hukum yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap indikator-indikator IDI sangat penting untuk menganalisis bagaimana optimalisasi kaderisasi partai politik dapat berkontribusi pada penguatan indeks demokrasi di Provinsi Lampung. Berikut adalah beberapa indikator utama yang menjadi bagian dari IDI:

1. Partisipasi Politik: Indikator ini mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik, termasuk kehadiran pemilih dalam pemilu, partisipasi dalam organisasi politik, dan aktivitas masyarakat sipil. Tingginya partisipasi politik menunjukkan bahwa masyarakat aktif dalam pengambilan keputusan dan memiliki kesadaran politik yang tinggi.

2. Kebebasan Sipil: Indikator ini menilai sejauh mana hak-hak individu dan kebebasan dasar dilindungi. Aspek yang diperhatikan meliputi kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers. Kebebasan sipil yang terjamin merupakan prasyarat penting bagi terciptanya lingkungan demokrasi yang sehat.
3. Proses Pemilihan: Indikator ini menggambarkan kualitas pemilihan umum yang dilaksanakan, termasuk transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Proses pemilihan yang baik memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dihargai, serta menciptakan legitimasi bagi pemimpin yang terpilih.
4. Fungsi Pemerintahan: Indikator ini menilai efektivitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Aspek yang dinilai mencakup integritas, transparansi, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Fungsi pemerintahan yang baik menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.
5. Kualitas Hukum: Indikator ini mengukur sejauh mana hukum diterapkan secara adil dan merata, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kualitas hukum yang tinggi menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara, yang merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi.
6. Keterbukaan Informasi: Indikator ini menilai sejauh mana informasi publik tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.

Dengan memahami indikator-indikator ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana proses kaderisasi partai politik dapat dioptimalkan untuk meningkatkan setiap aspek yang tercermin dalam IDI. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali pengalaman dan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat dalam

kaderisasi, serta dampaknya terhadap partisipasi politik dan kualitas demokrasi di Provinsi Lampung. Dengan demikian, analisis terhadap indikator-indikator IDI akan menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi kaderisasi yang lebih efektif dan berdampak positif bagi penguatan demokrasi di daerah tersebut.

2.3 Teori Peran Negara dalam Pendidikan Politik

Negara memegang peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan politik warganya melalui pendidikan politik, yang menjadi salah satu pilar penting bagi keberlanjutan sistem demokrasi. Pendidikan politik berfungsi untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, serta memiliki integritas dalam kehidupan berpolitik (Budiardjo, 2010). Kurniawan (2018) juga menegaskan bahwa pendidikan politik berperan dalam membentuk budaya politik partisipatif, yaitu kondisi di mana warga negara memiliki kesadaran politik, sikap kritis terhadap kebijakan publik, serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi sarana penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik (Finkel & Smith, 2017; Campbell, 2019).

Dalam konteks Provinsi Lampung, peran negara melalui pemerintah daerah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi yang tercermin dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat dan kader partai politik sebagai bagian dari pembinaan kehidupan politik di daerah (Republik Indonesia, 2017; Badan Pusat Statistik, 2022). Peran tersebut dapat dilihat melalui tiga fungsi pokok yang sekaligus dapat dijadikan indikator strategi pendidikan politik sebagai berikut:

Pertama, sebagai *civic educator*, Kesbangpol berperan memberikan bimbingan dan pendidikan politik kepada kader partai politik dengan menekankan pemahaman nilai-nilai demokrasi, etika berpolitik, serta kesadaran bernegara. Keberhasilan fungsi ini diukur dari sejauh mana Kesbangpol mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran kader partai politik terhadap nilai demokrasi serta hak dan kewajiban warga negara (Budiardjo, 2010). Indikator tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa sub-indikator, yaitu: (1) intensitas pelaksanaan program pendidikan politik seperti pelatihan, seminar, lokakarya, atau sekolah politik; (2) kualitas materi pendidikan yang mencakup demokrasi, konstitusi, serta etika politik; (3) tingkat partisipasi kader dalam kegiatan pendidikan politik; (4) peningkatan pemahaman kader terhadap sistem politik dan prinsip demokrasi setelah mengikuti kegiatan; serta (5) tingkat internalisasi nilai demokrasi dan sikap toleransi dalam perilaku kader, baik di ruang publik maupun dalam organisasi.

Kedua, sebagai mediator politik, Kesbangpol berfungsi menjembatani komunikasi antara masyarakat, partai politik, dan pemerintah guna menciptakan proses politik yang inklusif dan harmonis. Fungsi ini diukur melalui efektivitas Kesbangpol dalam membangun koordinasi dan komunikasi yang mampu menampung aspirasi masyarakat serta memfasilitasi interaksi antar aktor politik (Surbakti, 2010). Sub-indikatornya meliputi: (1) intensitas forum komunikasi politik yang difasilitasi; (2) efektivitas mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat melalui dialog atau konsultasi publik; (3) tingkat keterlibatan partai politik dalam forum koordinasi; (4) kemampuan dalam memediasi konflik atau perbedaan kepentingan antar aktor politik; serta (5) kualitas koordinasi dengan lembaga pemerintah, penyelenggara pemilu, dan organisasi masyarakat dalam menjaga stabilitas politik daerah.

Ketiga, sebagai *guardian of political morality*, Kesbangpol berperan menjaga agar praktik politik tetap sesuai dengan norma konstitusi, etika politik, dan nilai moral publik. Keberhasilan fungsi ini tercermin dari kemampuan Kesbangpol dalam memastikan aktivitas politik lokal berjalan sesuai hukum dan etika,

sehingga berkontribusi terhadap kualitas demokrasi yang sehat (Asshiddiqie, 2010). Sub-indikatornya meliputi: (1) intensitas pengawasan terhadap aktivitas politik dan partai politik; (2) tingkat kepatuhan partai politik terhadap regulasi yang berlaku; (3) upaya pembinaan etika politik kepada partai dan kader; (4) respons terhadap pelanggaran norma demokrasi; serta (5) kontribusi dalam menjaga stabilitas politik dan mendorong praktik politik yang berintegritas.

Dengan menggabungkan fungsi pokok dan indikator tersebut, peran Kesbangpol tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif dan edukatif. Strategi pendidikan politik yang dijalankan Kesbangpol Provinsi Lampung bagi kader partai politik menjadi salah satu upaya konkret untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, yang tercermin dalam peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, diharapkan dapat terbentuk kader partai politik yang berkompeten, partisipatif, serta memiliki integritas dalam menjalankan kehidupan politik yang demokratis (Badan Pusat Statistik, 2022).

2.4 Tinjauan Pendidikan Politik

2.4.1 Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan demokrasi. Pendidikan politik penting dilakukan agar warga negara, khususnya kader partai politik, memahami hak dan kewajibannya serta dapat berperan aktif dalam proses politik, termasuk dalam pengambilan keputusan partai maupun partisipasi dalam pemilu.

Menurut Kurniawan (2018), pendidikan politik adalah proses pembentukan orientasi politik individu melalui pengenalan terhadap nilai, norma, dan sistem politik dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan warga negara atau kader politik yang memiliki kesadaran politik dan mampu membuat keputusan politik secara rasional.

Pendidikan politik tidak hanya dilakukan secara formal melalui lembaga pendidikan, tetapi juga dapat dilakukan oleh lembaga pemerintahan, partai politik, maupun organisasi masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran penting sebagai institusi pemerintah yang bertugas menjaga stabilitas politik serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat, termasuk melalui kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik.

2.4.2 Bentuk Pendidikan Politik

Bentuk pendidikan politik merupakan berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta partisipasi politik warga negara, khususnya kader partai politik (Finkel & Smith, 2017; Campbell, 2019). Pendidikan politik dapat dilaksanakan melalui kegiatan formal, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis, seminar, dan pelatihan kader partai politik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Syafie, 2018). Selain itu, pendidikan politik juga dilakukan dalam bentuk nonformal, antara lain dialog politik, diskusi publik, forum komunikasi antarpantai, serta kegiatan temu tokoh yang bertujuan menanamkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi (Rasyid, 2019). Pendidikan politik selanjutnya dapat berbentuk pembinaan etika dan moral politik, yaitu penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum agar kader partai politik mampu menjalankan peran politik secara beretika (Soekanto, 2012). Di samping itu, pendidikan politik juga diwujudkan dalam bentuk pendidikan politik preventif, yang bertujuan mencegah konflik politik, politik identitas, dan pelanggaran demokrasi melalui peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman konstitusi (Wasistiono, 2009). Melalui berbagai bentuk pendidikan politik tersebut, diharapkan tercipta kader partai politik yang memiliki pemahaman demokrasi yang baik dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi daerah (Ndraha, 2011)

2.4.3 Jenis-Jenis Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi politik masyarakat, termasuk kader partai politik. Jenis-jenis pendidikan politik dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Pendidikan Politik Formal

Dilaksanakan melalui institusi resmi seperti sekolah atau perguruan tinggi. Materinya mencakup teori politik, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme partisipasi politik. Contoh: mata kuliah ilmu politik di universitas atau program civics di sekolah menengah (Budiardjo, 2010).

2. Pendidikan Politik Nonformal

Dilakukan di luar pendidikan formal melalui pelatihan, seminar, workshop, atau kegiatan masyarakat. Bersifat fleksibel dan praktis, fokus pada keterampilan politik dan strategi partisipasi. Contoh: pelatihan kader partai politik oleh Badan Kesbangpol (Surbakti, 2010).

3. Pendidikan Politik Informal

Terjadi secara alami melalui interaksi sosial, media massa, diskusi publik, dan pengalaman sehari-hari. Meskipun tidak terstruktur, sangat memengaruhi sikap dan perilaku politik individu. Contoh: menonton berita politik, diskusi komunitas, atau media sosial (Finkel & Smith, 2017; Campbell, 2019).

4. Pendidikan Politik Partisipatif

Menekankan pengalaman langsung dalam proses politik, seperti keterlibatan pemilu, kampanye, atau organisasi masyarakat. Bertujuan membekali peserta kemampuan praktis menjalankan peran politik. Contoh: simulasi pemilu, menjadi relawan kampanye, atau forum musyawarah desa (Budiardjo, 2010).

5. Pendidikan Politik Kaderisasi

Ditujukan untuk pengembangan kader partai politik atau calon pemimpin masa depan. Fokus pada pembentukan nilai, ideologi,

kepemimpinan, dan kemampuan organisasi politik. Contoh: program kaderisasi partai oleh Badan Kesbangpol atau partai politik (Surbakti, 2010).

Kader partai politik merupakan ujung tombak pelaksanaan program politik dan demokrasi di tingkat provinsi maupun nasional. Kualitas dan pemahaman politik kader sangat menentukan kualitas partisipasi politik masyarakat. Tanpa pendidikan politik yang memadai, kader partai politik rentan terhadap pengambilan keputusan yang kurang rasional, terpengaruh kepentingan pragmatis, serta berpotensi menurunkan kualitas demokrasi (Finkel & Smith, 2017; Campbell, 2019).

Di Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada kader partai politik melalui berbagai program sosialisasi, pelatihan, seminar, dan kerja sama dengan partai politik maupun organisasi kepemudaan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kader, membentuk orientasi politik yang rasional, kritis, dan demokratis, serta mendukung strategi peningkatan Indeks Demokrasi Provinsi Lampung (Badan Pusat Statistik, 2022).

Dengan demikian, pendidikan politik menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan partisipatif, menciptakan kader partai politik yang melek politik, serta memperkuat strategi peningkatan indeks demokrasi di Provinsi Lampung (Finkel & Smith, 2017; Campbell, 2019).

Berdasarkan uraian mengenai pengertian, bentuk, dan jenis pendidikan politik, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik merupakan proses penting dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi politik warga negara, khususnya kader partai politik. Pendidikan politik tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman tentang hak dan

kewajiban politik, tetapi juga membentuk orientasi, sikap, dan perilaku politik yang rasional, bertanggung jawab, serta berlandaskan nilai-nilai demokrasi (Budiardjo, 2010).

Pendidikan politik dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk, baik formal maupun nonformal, yang mencakup sosialisasi peraturan, pelatihan kader, dialog politik, pembinaan etika dan moral politik, serta upaya preventif untuk mencegah konflik dan pelanggaran demokrasi. Selain itu, pendidikan politik juga memiliki beragam jenis, mulai dari pendidikan politik formal, nonformal, dan informal, hingga pendidikan politik partisipatif dan kaderisasi. Keberagaman bentuk dan jenis pendidikan politik menunjukkan bahwa pendidikan politik merupakan proses berkelanjutan yang dapat dilakukan melalui berbagai saluran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kader partai politik (Finkel & Smith, 2017; Campbell, 2019).

Dalam konteks Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran strategis sebagai institusi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi kader partai politik. Melalui program sosialisasi, pelatihan, seminar, dan kerja sama dengan berbagai pihak, Kesbangpol berupaya membentuk kader partai politik yang memiliki pemahaman politik yang baik, beretika, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam kehidupan demokrasi. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi fondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat dan partisipatif serta menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Lampung.

2.5 Tinjauan Partai Politik dan Kader Politik

2.5.1 Konsep Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi untuk mewakili kepentingan rakyat,

menyusun kebijakan publik, dan mencalonkan kandidat untuk jabatan-jabatan politik. Secara umum, partai politik dapat didefinisikan sebagai organisasi yang terstruktur dengan tujuan utama untuk memenangkan pemilu dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan pemerintah. Partai politik bertugas untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan politik masyarakat, baik di tingkat lokal, provinsi, maupun nasional (Budiardjo, 2010).

Dalam sistem demokrasi, partai politik memegang peranan yang sangat penting, antara lain dalam proses rekrutmen politik, mobilisasi pemilih, dan pembentukan opini publik. Melalui partai politik, warga negara dapat terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Oleh karena itu, partai politik tidak hanya sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan kepentingan publik (Sukardi, 2021). Pada dasarnya, partai politik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Rekrutmen politik: Memilih dan menyiapkan calon-calon pemimpin politik yang akan duduk di lembaga legislatif atau eksekutif (Muzakir, 2015).
2. Mobilisasi pemilih: Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan memperjuangkan hak politik mereka (Wahid, 2010).
3. Penyusunan kebijakan: Membentuk dan mengusulkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat (Liddle, 2017).
4. Kontrol terhadap pemerintah: Mengawasi jalannya pemerintahan dan melakukan kritik serta koreksi jika diperlukan (Finkel & Smith, 2017; Campbell, 2019).

2.5.2 Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara yang memiliki kesamaan nilai, ideologi,

kepentingan, serta tujuan politik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan secara sah melalui mekanisme demokratis, khususnya pemilihan umum (Budiardjo, 2010). Keberadaan partai politik menjadi unsur penting dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dan wadah penyaluran aspirasi rakyat kepada pemerintah (Finkel & Smith, 2017; Campbell, 2019). Partai politik juga dipahami sebagai organisasi yang secara sadar dan terorganisasi berupaya menempatkan anggotanya dalam jabatan-jabatan publik guna memengaruhi proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik sesuai dengan kepentingan yang diperjuangkan (Sulis, 2019).

Selain itu, partai politik memiliki fungsi strategis dalam proses rekrutmen dan kaderisasi kepemimpinan politik. Melalui proses kaderisasi, partai politik menyiapkan individu-individu yang memiliki kemampuan, integritas, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan (Sartori, 2010). Partai politik juga berperan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat dan kadernya, dengan menanamkan pemahaman mengenai sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi dan konstitusi (Budiardjo, 2010).

Dalam konteks negara demokrasi, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sehingga mampu menciptakan komunikasi politik yang efektif dan berkelanjutan. Melalui fungsi ini, partai politik membantu menjaga stabilitas politik dan memperkuat legitimasi sistem pemerintahan yang demokratis (Finkel & Smith, 2017; Campbell, 2019). Dengan demikian, partai politik tidak hanya berperan sebagai alat perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai institusi demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral dan politik dalam membangun kehidupan politik yang sehat, partisipatif, dan beretika (Sartori, 2010).

2.5.3 Bentuk-Bentuk Partai politik

Partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana partisipasi politik, penyaluran aspirasi masyarakat, serta rekrutmen dan kaderisasi kepemimpinan politik (Budiardjo, 2010). Dalam perkembangannya, partai politik tidak bersifat tunggal dan seragam, melainkan hadir dalam berbagai bentuk yang dipengaruhi oleh sejarah, sistem politik, ideologi, serta dinamika sosial masyarakat. Pemahaman terhadap bentuk-bentuk partai politik menjadi penting untuk menilai bagaimana partai menjalankan fungsi politiknya, khususnya dalam proses pendidikan politik dan pembentukan kader partai. Oleh karena itu, kajian mengenai bentuk-bentuk partai politik menjadi landasan teoritis penting dalam memahami peran kader partai politik dalam kehidupan demokrasi (Surbakti, 2010).

1. Partai Massa

Partai yang memiliki jumlah anggota besar dan dukungan luas dari masyarakat. Biasanya terbuka untuk berbagai kelompok sosial dan aktif melakukan mobilisasi massa dalam kegiatan politik seperti pemilu.

2. Partai Kader

Partai yang lebih menekankan pada kualitas anggota dibanding jumlah. Anggotanya biasanya dipilih secara selektif dan memiliki pendidikan politik serta ideologi yang kuat.

3. Partai Ideologi

Partai yang dibentuk berdasarkan ideologi tertentu seperti nasionalisme, sosialisme, atau agama. Program dan kebijakannya sangat dipengaruhi oleh ideologi tersebut.

4. Partai Kepentingan (*Interest Party*)

Partai yang dibentuk untuk mewakili kepentingan kelompok tertentu, misalnya kelompok buruh, petani, atau kelompok ekonomi tertentu.

5. Partai *Catch-All*

Partai yang berusaha menarik dukungan dari berbagai kelompok masyarakat tanpa terlalu menonjolkan ideologi tertentu agar

mendapatkan suara pemilih yang lebih luas.

2.5.4 Jenis-Jenis Partai Politik

Partai politik merupakan institusi utama dalam sistem demokrasi yang memiliki peran strategis dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk kepemimpinan politik, serta menjalankan fungsi pendidikan politik (Budiardjo, 2010). Dalam praktiknya, partai politik tidak hadir dalam bentuk yang seragam, melainkan memiliki beragam jenis yang dibedakan berdasarkan ideologi, asas, basis sosial, orientasi program, sistem keanggotaan, serta perannya dalam sistem politik. Perbedaan jenis partai politik ini menunjukkan variasi cara partai dalam menjalankan fungsi politik dan membangun hubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis-jenis partai politik menjadi penting sebagai landasan teoritis untuk menganalisis peran kader partai politik dan dinamika kehidupan demokrasi di tingkat daerah (Surbakti, 2010).

a. Partai Politik Berdasarkan Ideologi

Partai politik berdasarkan ideologi adalah partai yang dibentuk dan dijalankan berdasarkan sistem nilai, pandangan hidup, dan ideologi tertentu yang menjadi dasar perjuangan politiknya. Ideologi tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menentukan sikap politik, program kerja, serta arah kebijakan partai dalam sistem pemerintahan (Budiardjo, 2008).

b. Partai Politik Berdasarkan Asas Keagamaan

Partai politik berdasarkan asas keagamaan merupakan partai yang menjadikan ajaran dan nilai-nilai agama sebagai landasan utama dalam merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi politiknya. Partai jenis ini biasanya berupaya memperjuangkan kepentingan politik masyarakat berdasarkan prinsip moral dan etika keagamaan (Sartori, 2010).

c. Partai Politik Berdasarkan Asas Nasionalisme

Partai politik berdasarkan asas nasionalisme adalah partai yang

menekankan persatuan, identitas kebangsaan, dan kepentingan nasional sebagai orientasi utama perjuangan politiknya. Partai ini berupaya memperkuat integrasi nasional dan menjaga keutuhan negara dalam kehidupan politik (Sartori, 2010).

d. Partai Politik Berdasarkan Basis Sosial

Partai politik berdasarkan basis sosial adalah partai yang dibentuk untuk mewakili kepentingan kelompok sosial tertentu, seperti buruh, petani, nelayan, atau kelompok profesional. Keberadaan partai ini bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kelompok pendukungnya dalam proses pengambilan kebijakan publik (Neumann, 2017).

e. Partai Politik Berdasarkan Orientasi Program

Partai politik berdasarkan orientasi program adalah partai yang lebih menekankan pada program kerja, visi, dan solusi kebijakan dibandingkan ideologi yang bersifat kaku. Partai jenis ini cenderung fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat serta dinamika politik (Finkel & Smith, 2017; Campbell, 2019)..

f. Partai Politik Berdasarkan Tujuan Kekuasaan

Partai politik berdasarkan tujuan kekuasaan adalah partai yang secara sadar dibentuk untuk memperoleh, mempertahankan, dan menjalankan kekuasaan politik melalui mekanisme demokratis, khususnya pemilihan umum. Jenis partai ini menempatkan perebutan jabatan publik sebagai sarana utama untuk memengaruhi kebijakan negara (Finkel & Smith, 2017; Campbell, 2019).

g. Partai Politik Berdasarkan Sistem Keanggotaan

Partai politik berdasarkan sistem keanggotaan dapat dibedakan menjadi partai dengan keanggotaan terbuka dan partai dengan keanggotaan tertutup. Partai dengan keanggotaan terbuka menerima anggota dari berbagai latar belakang masyarakat, sedangkan partai dengan keanggotaan tertutup menerapkan seleksi ketat terhadap calon anggotanya (Finkel & Smith, 2017; Campbell, 2019).

h. Partai Politik Berdasarkan Perannya dalam Sistem Politik

Partai politik berdasarkan perannya dalam sistem politik dibedakan menjadi partai pemerintah dan partai oposisi. Partai pemerintah adalah partai atau gabungan partai yang mendukung dan menjalankan pemerintahan, sedangkan partai oposisi berperan sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan pemerintah dalam sistem demokrasi (Sartori, 2010).

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis partai politik, dapat disimpulkan bahwa keberagaman jenis partai politik mencerminkan dinamika dan kompleksitas sistem politik demokratis. Setiap jenis partai politik memiliki karakteristik, orientasi, serta strategi berbeda dalam memperjuangkan kepentingan politik dan membangun partisipasi masyarakat. Perbedaan tersebut memengaruhi pola kaderisasi, pendidikan politik, serta kualitas partisipasi politik yang dihasilkan (Budiardjo, 2010; Sartori, 1976). Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis partai politik menjadi penting dalam menilai peran dan kapasitas kader partai politik untuk mendukung praktik demokrasi yang sehat dan beretika. Kajian ini juga menjadi dasar untuk memahami kontribusi partai politik dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan mendukung upaya peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), khususnya di Provinsi Lampung (Badan Pusat Statistik, 2022).

Berdasarkan pembahasan mengenai pengertian, bentuk, dan jenis partai politik, partai politik dapat dipandang sebagai institusi politik yang memiliki peran sentral dalam sistem demokrasi. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana perebutan dan pelaksanaan kekuasaan politik, tetapi juga sebagai wahana partisipasi politik, penyaluran aspirasi masyarakat, serta rekrutmen dan kaderisasi kepemimpinan politik. Melalui partai politik, nilai, ideologi, dan kepentingan masyarakat diartikulasikan dan diartikulasikan dalam proses politik yang demokratis (Finkel & Smith, 2017; Campbell, 2019).

Partai politik hadir dalam berbagai bentuk, seperti partai kader, partai massa, partai *catch-all*, dan partai kartel, yang masing-masing memiliki karakteristik dan pola kerja berbeda sesuai dengan perkembangan sistem politik dan demokrasi. Selain itu, partai politik juga memiliki beragam jenis yang dibedakan berdasarkan ideologi, asas, basis sosial, orientasi program, sistem keanggotaan, serta perannya dalam sistem politik (Sartori, 1976). Keberagaman bentuk dan jenis partai politik menunjukkan bahwa partai politik merupakan institusi yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman terhadap pengertian, bentuk, dan jenis partai politik menjadi landasan penting dalam menganalisis peran kader partai politik dalam kehidupan demokrasi. Kualitas partai politik dan kader yang dihasilkannya sangat menentukan kualitas partisipasi politik dan praktik demokrasi di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kajian mengenai partai politik menjadi dasar konseptual untuk menilai peran kader partai politik serta kontribusinya dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), khususnya di Provinsi Lampung (Badan Pusat Statistik, 2022).

2.6 Tinjauan Kader Partai Politik

2.6.1 Definisi Kader

Kader merupakan individu yang secara sadar direkrut, dibina, dan dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk menjalankan peran strategis dalam mencapai tujuan organisasi serta menjamin keberlanjutan gerak organisasi tersebut. Kader tidak hanya diposisikan sebagai anggota biasa, tetapi sebagai sumber daya utama yang memiliki loyalitas tinggi, kesadaran ideologis, serta kesiapan untuk mengemban tanggung jawab organisasi dalam jangka panjang (Kartodirdjo, 2018). Dalam organisasi politik, kader dipahami sebagai tulang punggung partai yang berfungsi menggerakkan struktur organisasi, menjalankan program kerja, serta menyebarkan nilai dan ideologi partai kepada masyarakat luas

(Budiardjo, 2010).

Lebih jauh, kader merupakan hasil dari proses kaderisasi yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan. Proses kaderisasi ini mencakup pendidikan politik, pembinaan ideologi, pelatihan kepemimpinan, serta penguatan etika dan moral politik agar kader memiliki kapasitas intelektual, sikap demokratis, dan tanggung jawab sosial yang tinggi (Surbakti, 2010). Melalui proses tersebut, kader diharapkan mampu memahami sistem politik, mekanisme demokrasi, serta dinamika kekuasaan, sehingga dapat berpartisipasi secara rasional dan konstruktif dalam kehidupan politik (Finkel & Smith, 2017; Campbell, 2019).

Kader juga memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara organisasi dan masyarakat. Dalam konteks partai politik, kader berperan menyerap, menyalurkan, dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan dan program partai, sekaligus menyosialisasikan kebijakan partai kepada konstituen secara beretika dan bertanggung jawab (Rasyid, 2018). Dengan peran tersebut, kader menjadi aktor penting dalam membangun komunikasi politik yang sehat serta menjaga kepercayaan publik terhadap partai politik dan sistem demokrasi.

Selain fungsi operasional, kader juga berperan dalam menjaga stabilitas dan regenerasi kepemimpinan organisasi. Kader yang berkualitas akan menentukan keberhasilan regenerasi kepemimpinan dan keberlanjutan organisasi politik dalam jangka panjang. Tanpa kaderisasi yang baik, organisasi politik berpotensi mengalami krisis kepemimpinan, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta menurunnya kualitas demokrasi internal partai (Panebianco, 2019). Oleh karena itu, pembinaan kader tidak hanya diarahkan pada penguasaan keterampilan teknis politik, tetapi juga pada pembentukan karakter, integritas, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi (Soekanto, 2012).

Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), kader partai politik dipandang sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kualitas demokrasi daerah. Pembinaan kader oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan kader partai politik yang memiliki pemahaman konstitusional, kesadaran hukum, serta sikap politik yang moderat dan bertanggung jawab (Wasistiono, 2015). Dengan demikian, kader tidak hanya berfungsi sebagai pelaku politik partisan, tetapi juga sebagai agen demokrasi yang berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat daerah (Ndraha, 2011).

2.6.2 Bentuk-Bentuk Kader

Kader merupakan elemen penting dalam keberlangsungan dan efektivitas organisasi, khususnya organisasi politik dan partai politik. Keberadaan kader tidak hanya dipahami sebagai keanggotaan formal, tetapi juga sebagai sumber daya manusia yang memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi organisasi, menjaga ideologi, serta mendorong partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, kader dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan tingkat keterlibatan, fungsi, dan kapasitas perannya dalam struktur organisasi dan sistem politik. Pembagian bentuk-bentuk kader ini bertujuan untuk memahami posisi kader secara lebih sistematis serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi dan penguatan demokrasi.

a. Kader Inti

Kader inti merupakan kader yang berada pada lapisan utama organisasi dan memiliki tingkat loyalitas, militansi, serta komitmen ideologis yang tinggi. Kader ini umumnya terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategis, perumusan kebijakan organisasi, serta pengendalian arah perjuangan organisasi atau partai politik. Kader inti juga menjadi penggerak utama roda organisasi dan bertanggung jawab menjaga konsistensi ideologi serta soliditas

internal organisasi (Panebianco, 1988).

b. Kader Struktural

Kader struktural adalah kader yang menduduki jabatan formal dalam struktur organisasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kader ini bertugas menjalankan fungsi manajerial, administratif, dan operasional organisasi sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Dalam konteks partai politik, kader struktural memiliki peran penting dalam mengoordinasikan program partai, melaksanakan kebijakan, serta menjembatani komunikasi antara pimpinan dan anggota (Budiardjo, 2008).

c. Kader Fungsional

Kader fungsional merupakan kader yang berperan sesuai dengan keahlian, profesi, atau kompetensi tertentu yang dimilikinya. Kader ini tidak selalu menduduki jabatan struktural, tetapi berkontribusi melalui fungsi-fungsi khusus seperti pendidikan politik, advokasi kebijakan, komunikasi publik, atau penguatan basis massa. Keberadaan kader fungsional sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan profesionalisme organisasi politik (Surbakti, 2010).

d. Kader Massa

Kader massa adalah kader yang berperan sebagai penggerak dan penghubung langsung dengan masyarakat akar rumput. Kader ini bertugas menyosialisasikan program dan ideologi organisasi kepada masyarakat serta menggalang dukungan politik secara luas. Kader massa memiliki peran strategis dalam membangun partisipasi politik dan memperkuat legitimasi organisasi di tengah masyarakat (Finkel & Smith, 2017; Campbell, 2019).

e. Kader Potensial

Kader potensial merupakan individu yang telah direkrut dan diidentifikasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kader inti atau kader struktural di masa depan. Kader ini biasanya masih berada pada tahap awal pembinaan dan kaderisasi, namun menunjukkan kemampuan, loyalitas, serta komitmen yang

menjanjikan. Pengembangan kader potensial menjadi investasi jangka panjang organisasi dalam menjaga regenerasi kepemimpinan (Kartodirdjo, 1992).

f. Kader Ideologis

Kader ideologis adalah kader yang memiliki pemahaman mendalam terhadap nilai, ideologi, dan visi organisasi. Kader ini berfungsi sebagai penjaga nilai dan arah ideologis organisasi agar tetap konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tujuan perjuangan. Dalam partai politik, kader ideologis berperan penting dalam mencegah penyimpangan nilai serta menjaga moral dan etika politik internal (Soekanto, 2012).

g. Kader Profesional

Kader profesional merupakan kader yang dibina dengan orientasi pada peningkatan kapasitas teknis, kompetensi kepemimpinan, dan kemampuan manajerial. Kader ini diharapkan mampu menjalankan peran politik secara efektif, rasional, dan bertanggung jawab, terutama ketika menduduki jabatan publik atau posisi strategis dalam pemerintahan. Keberadaan kader profesional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan demokrasi (Ndraha, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kader mencerminkan keragaman peran dan fungsi individu dalam organisasi politik. Setiap bentuk kader memiliki kontribusi yang saling melengkapi, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan program, hingga penguatan partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan kader perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar seluruh bentuk kader dapat berfungsi secara optimal. Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya melalui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemahaman terhadap bentuk-bentuk kader ini menjadi dasar penting dalam merancang program pendidikan politik yang efektif guna meningkatkan kualitas kader partai politik dan mendukung peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi

Lampung.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian dan jenis kader, dapat dipahami bahwa kader merupakan elemen fundamental dalam organisasi, khususnya organisasi dan partai politik, yang berperan sebagai penggerak utama dalam menjalankan fungsi organisasi serta menjamin keberlangsungan sistem politik dan demokrasi. Kader tidak sekadar diposisikan sebagai anggota formal, melainkan sebagai individu yang dipersiapkan secara sadar, sistematis, dan berkelanjutan melalui proses kaderisasi untuk memiliki kapasitas intelektual, keterampilan politik, komitmen ideologis, serta integritas moral yang memadai. Dengan demikian, keberadaan kader menjadi penentu kualitas organisasi politik dalam menjalankan peran representasi, artikulasi kepentingan, dan pendidikan politik kepada masyarakat.

Pembahasan mengenai jenis-jenis kader menunjukkan bahwa kader dalam organisasi politik memiliki peran yang beragam dan tidak bersifat homogen. Kader inti berfungsi sebagai penentu arah kebijakan dan penjaga ideologi organisasi, kader struktural bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan pengelolaan organisasi secara kelembagaan, kader fungsional berkontribusi melalui keahlian dan kompetensi tertentu, sementara kader massa berperan langsung dalam membangun partisipasi politik dan hubungan dengan masyarakat akar rumput. Di sisi lain, kader potensial menjadi investasi jangka panjang organisasi dalam menjaga regenerasi kepemimpinan, kader ideologis berfungsi menjaga konsistensi nilai dan moral politik, dan kader profesional dipersiapkan untuk menjalankan peran politik secara efektif, rasional, dan bertanggung jawab, terutama dalam jabatan publik dan pemerintahan.

Keberagaman jenis kader tersebut mencerminkan kompleksitas organisasi politik dalam sistem demokrasi modern yang menuntut pembagian peran secara jelas, efektif, dan saling melengkapi. Tanpa

pengelolaan kader yang baik, organisasi politik berpotensi mengalami lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya kualitas kepemimpinan, serta menurunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, pendidikan dan pembinaan kader menjadi aspek strategis yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teknis politik, tetapi juga pada pembentukan sikap demokratis, kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta etika dan moral politik.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian dan jenis kader menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan pembinaan politik yang efektif. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai representasi pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pendidikan politik dan pembinaan kader partai politik agar mampu menjalankan peran politiknya secara dewasa, moderat, dan konstitusional. Upaya pembinaan kader yang terencana dan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan kader partai politik yang tidak hanya kompeten secara politik, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.

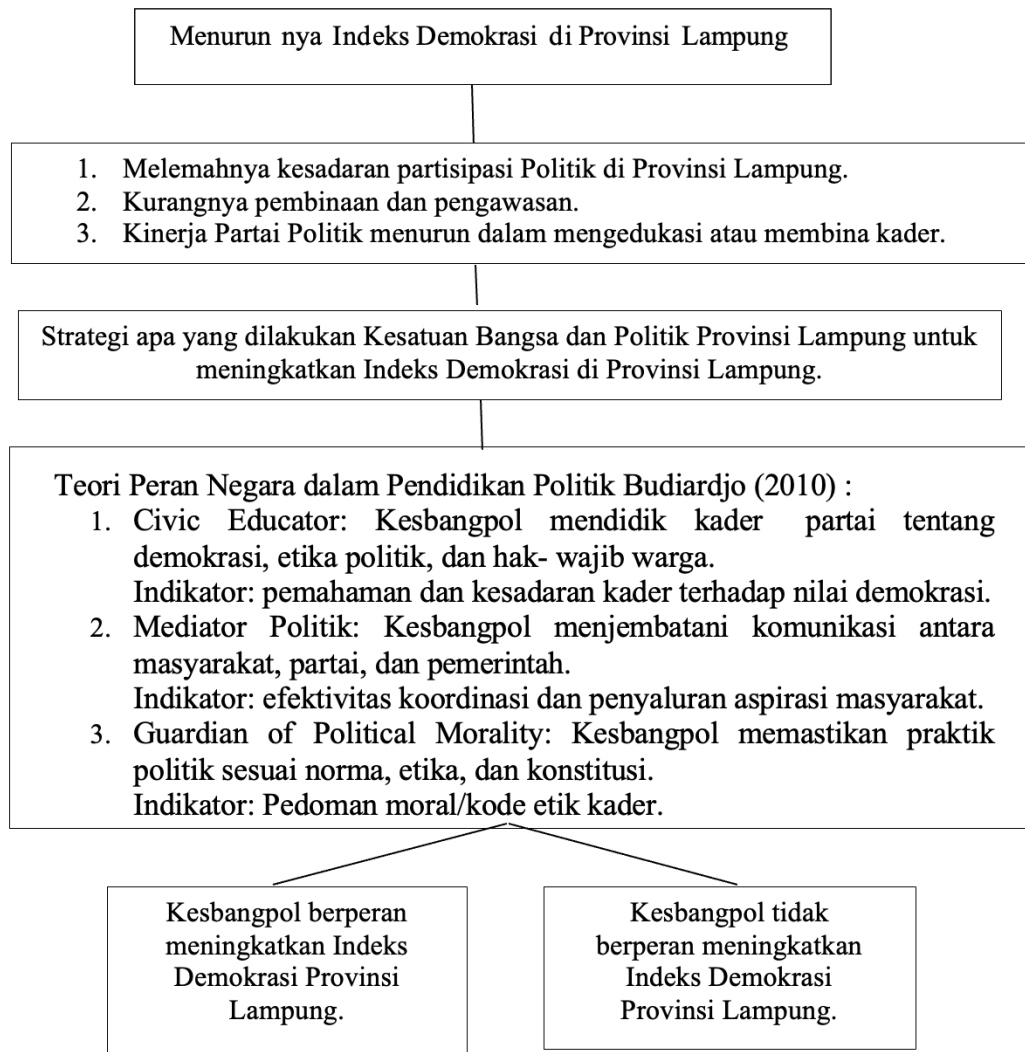
Dengan demikian, kualitas kader partai politik menjadi salah satu faktor kunci dalam peningkatan kualitas demokrasi daerah. Kader yang memiliki pemahaman politik yang baik, sikap demokratis, serta kemampuan menjalankan peran politik secara etis akan berkontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi politik, penguatan kelembagaan partai politik, serta stabilitas politik daerah. Pada akhirnya, penguatan kader melalui pendidikan politik yang efektif merupakan bagian integral dari strategi peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Lampung dan pembangunan demokrasi yang berkelanjutan.

2.7 Kerangka Pikir

Indeks demokrasi merupakan indikator penting untuk menilai partisipasi politik, kesadaran masyarakat, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di

Provinsi Lampung. Salah satu faktor yang memengaruhi indeks demokrasi adalah kualitas kader partai politik, yang menjadi penggerak utama partisipasi politik masyarakat. Pendidikan politik yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung berperan penting dalam membekali kader partai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran politik. Dengan pendidikan politik yang efektif, kader diharapkan mampu menjalankan peran politik secara rasional dan bertanggung jawab, serta mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, kerangka pikir penelitian ini dirancang untuk menjelaskan hubungan antara peran pendidikan politik Kesbangpol dengan kompetensi dan partisipasi kader partai politik, serta dampaknya terhadap peningkatan indeks demokrasi Provinsi Lampung.



Gambar 2. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memahami secara mendalam peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung dalam peningkatan kualitas demokrasi. Pendekatan ini menekankan pada makna dan proses, bukan pada pengukuran kuantitatif (Moleong, 2017).

Penelitian ini bertujuan menggambarkan strategi, program, dan bentuk peran Kesbangpol dalam pendidikan politik dengan menggunakan teori peran, yang melihat lembaga berdasarkan fungsi dalam sistem pemerintahan (Budiardjo, 2015). Dalam konteks ini, Kesbangpol diposisikan sebagai civic educator, mediator politik, dan guardian of political morality.

Namun, penelitian ini tidak mengkaji seluruh faktor yang memengaruhi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), melainkan berfokus pada pendidikan politik dan peran kelembagaan Kesbangpol. Dengan demikian, analisis diarahkan pada kontribusi spesifik terhadap kualitas demokrasi, khususnya pada dimensi lembaga demokrasi (Badan Pusat Statistik, 2022).

3.2 Fokus Penelitian

Dalam konteks Provinsi Lampung, peran negara melalui pemerintah daerah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan Indeks Demokrasi melalui pendidikan politik bagi kader partai politik. Kesbangpol memiliki tiga fokus fungsi pokok, yang sekaligus dapat dijadikan indikator strategi pendidikan politik:

1. *Civic Educator*: Kesbangpol memberikan bimbingan dan pendidikan politik yang menekankan pemahaman nilai-nilai demokrasi, etika berpolitik, dan kesadaran bernegara. Indikatornya adalah tingkat keberhasilan Kesbangpol dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran kader partai politik terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak serta kewajiban warga negara.
2. *Mediator Politik*: Kesbangpol berperan menjembatani komunikasi antara masyarakat, partai politik, dan pemerintah pusat, menciptakan proses politik yang inklusif dan harmonis. Indikatornya adalah efektivitas Kesbangpol dalam membangun koordinasi dan komunikasi yang mampu menampung aspirasi masyarakat serta memfasilitasi interaksi antara aktor politik.
3. *Guardian of Political Morality*: Kesbangpol menjaga agar praktik politik di daerah tetap sesuai dengan norma konstitusi dan etika politik, serta mencegah penyimpangan yang dapat merusak demokrasi. Indikatornya adalah kemampuan Kesbangpol dalam memastikan aktivitas politik lokal berjalan sesuai hukum, etika, dan nilai moral publik, sehingga berkontribusi pada kualitas demokrasi yang sehat.

Dengan fokus pada tiga indikator peran tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana Kesbangpol Provinsi Lampung menjalankan perannya dalam meningkatkan indeks demokrasi di Provinsi Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung yang berlokasi di Kota Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih karena Kesbangpol merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, serta pendidikan politik masyarakat.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan

pejabat maupun staf Badan Kesbangpol Provinsi Lampung yang berhubungan dengan bidang pendidikan politik, serta beberapa kader Partai Politik. Data primer ini penting karena menggambarkan pandangan, pengalaman, dan peran Kesbangpol secara nyata.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan pendidikan politik dan peran Kesbangpol. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi, memperkuat, dan memperjelas temuan data primer sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif.

3.5 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif berupa informasi dalam bentuk kata-kata, pendapat, narasi, serta deskripsi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai peran Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam strategi peningkatan indeks demokrasi Provinsi Lampung. Data ini memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana Kesbangpol berperan sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam meningkatkan kesadaran politik generasi muda (Sugiyono, 2019).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data tertulis berupa dokumen, arsip, laporan kegiatan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan politik. Data tersebut berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi hasil wawancara sehingga analisis yang dihasilkan lebih menyeluruh (Lexy J. Moleong, 2017).

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung (Moleong, 2017).

Pejabat dan staf Kesbangpol dipilih sebagai pelaksana program untuk menggali peran sebagai civic educator (pelaksanaan pendidikan politik), mediator politik (menjembatani hubungan antar aktor), dan guardian of political morality (pembinaan etika politik).

Sementara itu, kader partai politik dipilih sebagai penerima program untuk menilai implementasi ketiga peran tersebut dalam meningkatkan pemahaman politik, partisipasi, dan etika politik. Dengan demikian, pemilihan informan ini memungkinkan analisis yang relevan dan seimbang antara pelaksana dan penerima program.

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Supardi Pramono	Staff Bidang Poldagri
2.	Erlina	Staff Bidang Poldagri
3.	Abu Nikman	Kader Partai Politik PAN
4.	Ranang Rasyid	Kader Partai Politik GOLKAR
5.	Rara	Kader Partai Politik PKB

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memilah, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi sehingga sesuai dengan fokus penelitian, yaitu peran Kesbangpol Provinsi Lampung dalam meningkatkan Indeks Demokrasi Provinsi Lampung.

Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data ini bertujuan untuk menampilkan informasi yang runtut mengenai peran Kesbangpol, baik sebagai *Civic Educator*, Mediator Politik, maupun *Guardian of Political Morality* sesuai dengan teori

Peran Negara dalam Pendidikan Politik oleh Budiardjo (2010). Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan, yaitu memberikan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan alur tersebut, data yang diperoleh dari lapangan dapat diolah secara sistematis sehingga menghasilkan temuan yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber, menggunakan beragam metode pengumpulan data, serta melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari pejabat Kesbangpol, staf pelaksana, dan pemilih pemula. Triangulasi teknik dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan mengulang pengumpulan data pada kesempatan yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi.

Selain triangulasi, keabsahan data juga dijaga dengan melakukan pengecekan kembali kepada informan (*member check*), sehingga informasi yang digunakan benar-benar sesuai dengan pengalaman dan realitas yang terjadi di lapangan. Dengan langkah ini, hasil penelitian diharapkan akurat, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kualitas demokrasi di Provinsi Lampung yang tercermin dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) masih berada pada kategori sedang dan cenderung fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di daerah belum sepenuhnya optimal, khususnya pada aspek kelembagaan demokrasi yang berkaitan dengan peran partai politik dalam kaderisasi dan pendidikan politik.

Kesbangpol Provinsi Lampung telah menjalankan perannya melalui berbagai program pendidikan politik bagi kader partai politik. Peran ini mencerminkan fungsi Kesbangpol sebagai civic educator, mediator politik, dan guardian of political morality dalam meningkatkan pemahaman politik dan kapasitas kader. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan demokrasi melalui pendidikan politik.

Namun demikian, efektivitas program tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena belum adanya tindak lanjut yang maksimal dari partai politik. Sebagian partai politik belum menjaga keberlanjutan komunikasi dan belum mengimplementasikan hasil pendidikan politik ke dalam kaderisasi dan penguatan organisasi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Kesbangpol telah berjalan, namun keberhasilan pendidikan politik sangat bergantung pada komitmen partai politik dalam menindaklanjuti dan menginternalisasikan hasilnya, sehingga diperlukan penguatan sinergi untuk meningkatkan kualitas demokrasi daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, saran berikut disusun sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pendidikan politik serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendukung kualitas demokrasi di Provinsi Lampung:

1. Bagi Kesbangpol Provinsi Lampung, perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pasca kegiatan pendidikan politik agar terdapat kejelasan tindak lanjut dari setiap program yang dilaksanakan.
2. Kesbangpol disarankan mengembangkan program pendidikan politik yang lebih berkelanjutan, tidak hanya bersifat satu kali kegiatan, tetapi dalam bentuk pembinaan atau pendampingan berkala kepada partai politik.
3. Kesbangpol dapat membentuk forum komunikasi rutin dengan partai politik sebagai wadah koordinasi, diskusi, dan evaluasi bersama terkait implementasi pendidikan politik.
4. Bagi Partai Politik, diperlukan peningkatan komitmen dalam menindaklanjuti hasil pendidikan politik dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem kaderisasi dan kegiatan internal organisasi.
5. Partai Politik disarankan untuk lebih mengutamakan penguatan kapasitas kader secara berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada kepentingan elektoral jangka pendek.
6. Bagi hubungan Kesbangpol dan Partai Politik, perlu dibangun sinergi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar program pendidikan politik yang telah dilaksanakan dapat diimplementasikan secara nyata di tingkat partai.
7. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas pendidikan politik dengan pendekatan yang lebih luas, seperti melibatkan perspektif kader partai politik atau mengukur dampaknya terhadap perilaku politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-dasar ilmu politik (Edisi revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwipayana, A. (2018). Oligarki lokal dalam politik desentralisasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 1–15.
- Fadli, M. (2020). Indeks Demokrasi Indonesia sebagai instrumen evaluasi demokrasi. *Jurnal Bina Praja*, 12(3), 351–364.
- Fathurahman, M. (2021). Etika politik dalam praktik kekuasaan lokal. *Jurnal Etika dan Filsafat Politik*, 2(1), 55–69.
- Fauzi, A., & Hidayat, R. (2022). Media sosial dan partisipasi politik generasi muda. *Jurnal Komunikasi Politik*, 4(1), 11–26.
- Firmansyah, A. (2021). Kaderisasi partai politik di tengah disrupsi digital. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 17(1), 122–135.
- Firmanzah. (2018). *Marketing politik: Antara pemahaman dan realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fitriyani, D. (2021). Peran pemerintah daerah dalam penguatan demokrasi lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 5(1), 45–59.
- Gaffar, A. (2018). *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, S. (2018). Konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), 1–14.
- Haris, S. (2018). *Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Heryanto, G. G. (2019). Etika kekuasaan dalam praktik politik lokal. *Jurnal Etika Sosial*, 3(1), 41–55.

- Hidayat, S. (2017). Konsolidasi demokrasi dan tantangannya di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 15–29.
- Kartini, D., & Prasetyo, T. (2019). Rekrutmen dan kaderisasi partai politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 9(1), 23–37.
- Kurniawan, A. (2021). Budaya politik parokial hingga partisipatif di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 141–155.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2017). Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari, R. (2018). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 16(1), 23–38.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R., & Wicaksono, K. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 89–103.
- Nurhasim, M. (2019). Dinasti politik dan pelemahan demokrasi lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 121–136.
- Nurmandi, A. (2017). Demokrasi elektoral dan kualitas demokrasi lokal. *Jurnal Governance*, 2(2), 85–99.
- Pramono, J. (2018). Desentralisasi dan demokrasi lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 101–115.
- Prayugo, R., & Prayitno. (2022). Pendidikan politik dalam penguatan budaya demokrasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Priyono, A. E. (2016). Demokrasi tanpa partai? Tantangan kelembagaan politik di Indonesia. *Jurnal Politica*, 7(1), 1–18.
- Purwaningsih, T. (2017). Politik dinasti dalam demokrasi lokal Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 113–128.
- Rahman, F. (2019). Relasi kepala daerah dan partai politik di era pilkada langsung. *Jurnal Politik Lokal*, 2(2), 73–88.
- Romli, L. (2018). Pelembagaan partai politik di era reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(1), 1–15.
- Romli, L. (2020). Rekrutmen politik dan pelembagaan partai politik di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 25–40.

- Rusmana, A. R., dkk. (2024). Kajian tentang dinasti politik: Realitas dan dampaknya di Indonesia dari perspektif etika politik. *Jurnal Etika Politik*, 6(1), 1–15.
- Sari, N. P. (2020). Peran Kesbangpol dalam pembinaan politik di daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 5(1), 59–72.
- Setiawan, B. (2019). Budaya politik dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal. *Jurnal Sosiologi Politik*, 4(1), 33–48.
- Pamungkas, S. (2016). *Partai politik: Teori dan praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sulastri, D. (2021). Dinasti politik dan tantangan demokrasi substansial. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 89–104.
- Surbakti, R. (2016). *Memahami ilmu politik (Edisi revisi)*. Jakarta: Grasindo.
- Surbakti, R. (2018). *Partai politik dan sistem kepartaian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryanto, T. (2020). Dinamika politik lokal pasca pilkada langsung. *Jurnal Politik Lokal*.
- Susanti, E., & Nugroho, H. (2019). Kaderisasi partai politik dalam sistem multipartai. *Jurnal Politik Indonesia*, 11(1), 45–60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Wicaksono, D. A. (2021). Pendidikan politik internal partai dan kualitas kader. *Jurnal Pendidikan Politik*, 6(2), 101–115.
- Wijayanto, A. (2020). Kaderisasi partai politik dan tantangan reformasi demokrasi lokal. *Jurnal Politik Indonesia*, 12(2), 87–102.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: Competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317.
- Fossati, D., Aspinall, E., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. *Electoral Studies*, 63, 1–10.
- Muhtadi, B. (2019). Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery. *Journal of East Asian Studies*, 19(1), 1–24.
- Warburton, E., & Power, T. P. (2017). Indonesia and the illusion of democratic consolidation. *Journal of Contemporary Asia*, 47(4), 578–598.